



Lelang Lanskap MPP Kota Madiun Tuai Sorotan Dewan

Madiun, Memorandum

Proses lelang proyek penataan lanskap Mall Pelayanan Publik (MPP) milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun menuai perhatian.

Pasalnya, CV BJ selaku pemenang lelang mengajukan penawaran sebesar Rp 638.120.000, atau menyusut hingga 20 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan sebesar Rp 797.650.000.

Penurunan nilai penawaran yang cukup signifikan ini memicu spekulasi terkait besaran margin keuntungan kontraktor hingga risiko penurunan kualitas hasil pekerjaan di lapangan.

Menanggapi fenomena tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Madiun Nur Salim, menyatakan mendukung jika penurunan harga tersebut murni merupakan bentuk efisiensi anggaran. Namun, dia menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam jika penawaran rendah itu justru memicu masalah saat pelaksanaan. “Prinsipnya kami berupaya menjadi mitra bagi OPD. Belajar dari yang



Komisi III DPRD Kota Madiun Nur Salim

sudah-sudah, kalau ini bentuk efisiensi, ya kami *support*. Tapi kalau bukan efisiensi dan berpotensi membuat pelaksanaan pekerjaan bermasalah, tentu kami mendorong dan mengontrolnya karena fungsi kami di situ,” ujarnya, Selasa (11/8).

Menurut Nur Salim, hingga saat ini informasi yang diterima menunjukkan bahwa seluruh proses administratif dan teknis lelang telah berjalan sesuai prosedur tanpa kendala, termasuk tahap verifikasi.

Kendati demikian, komisi III tetap berencana memanggil dinas terkait untuk melakukan koordinasi dan evaluasi.

“Secara prinsip dan prosedur, proses awal ini sudah dijalani sebagaimana mestinya. Namun, kami nanti akan memanggil dinas terkait. Dalam prosesnya nanti, kami tetap akan memantau secara temporer (berkala),” tambahnya.

Nur Salim juga menilai bahwa dinamika penawaran harga dengan selisih jauh ini tak lepas dari era digitalisasi dan petunjuk pelaksanaan serta teknis (juklak-juknis) dari pemerintah pusat yang kian terbuka. Dinamika ini memberikan ruang sekaligus tantangan baru bagi OPD terkait dalam mengawal proyek pembangunan di

Kota Madiun.

Dia pun mengimbau DPUPR untuk mengubah pola pengawasan dan meningkatkan kewaspadaan agar penawaran nilai rendah dari pihak penyedia jasa tidak mengorbankan mutu bangunan.

“Ini fenomena baru yang harus benar-benar diwaspadai oleh OPD. Kalau memang ini benar dan baik untuk Kota Madiun, kenapa tidak? Namun karena realitasnya kita sama-sama belum tahu sejauh mana nanti, tahap pelaksanaan inilah yang harus terus kita pantau dan kontrol bersama,” pungkasnya. (ggi/nov)

Pemkot Madiun Pinta Rehab SD Tak Molor

Madiun, Memorandum

Sembilan sekolah dasar (SD) di Kota Madiun digelontor anggaran rehabilitasi dari kemendikdasmen tahun ini.

Dua proyek sudah berjalan, sementara sisanya masih menunggu proses penandatanganan kerja sama. Namun, pemkot meminta pelaksana mempercepat pekerjaan agar tidak molor dari tenggat waktu yang ditentukan.

Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengatakan, pihaknya mulai mengecek langsung progres rehabilitasi di dua SD. Pertama di SDN Manguharjo yang mendapat anggaran sekitar Rp 680 juta.

Anggaran tersebut digunakan untuk membenahi empat ruang kelas, satu toilet, dan satu perpustakaan. Pengerjaan telah berlangsung sekitar dua bulan dengan progres minus 0,89 persen dan saat ini masih dalam tahap penyelesaian struktur bangunan.

“Ini sudah berjalan kurang lebih dua bulan. Tadi masih menyiapkan sarana struktur bangunannya,” ujarnya, Selasa (11/8).

Kemudian, Bagus juga mengecek rehabilitasi SDN Ngengong yang memperoleh anggaran sekitar Rp 513,3 juta. Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki empat ruang kelas.

Sementara satu ruang kelas lainnya bakal ditangani menggunakan APBD Kota Madiun. Saat ini, progres pengerjaan surplus 1,82 persen dari target 19,52 persen hingga minggu ketujuh.

Selain itu, selama proses pembelajaran, siswa kelas IV, V, dan VI sementara dipindahkan ke ruangan lain. Kelas IV dan VI menggunakan ruang kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan kelas V menempati ruang



Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengecek proyek rehabilitasi di SDN Manguharjo dan SDN Ngengong, Selasa (11/8).

perpustakaan.

Pemkot, lanjut Bagus, akan kembali mengecek proyek tersebut menjelang tahap akhir pengerjaan. Pengawasan tidak hanya menyangkut ketepatan waktu, tetapi juga kualitas bangunan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan siswa.

“Nanti akan kami cek lagi saat mendekati *finishing*. Supaya bisa dilihat kualitas bangunan dan kebutuhan masing-masing siswa,” katanya.

Menurut Bagus, rehabilitasi sekolah dari pemerintah pusat tahun ini tidak hanya menasar dua lokasi tersebut. Total terdapat sembilan sekolah yang memperoleh anggaran setelah sebelumnya diusulkan pemkot

kepada kemendikdasmen.

“Total sembilan sekolah. Kami sudah mendapat surat bahwa sembilan sekolah yang diajukan mendapatkan anggaran rehab dari Kementerian Pendidikan,” jelasnya.

Bagus mengakui terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan di SDN Manguharjo. Karena itu, dia meminta dinas pendidikan dan pelaksana proyek segera mengejar progres agar pekerjaan rampung sesuai jadwal.

“Saya sudah sampaikan ke dinas, khususnya pelaksana proyek, untuk mengejar waktu. Jangan sampai terlambat dari waktu yang sudah ditentukan,” tegasnya. (ggi/nov)

Wilayah Kekeringan di Ngawi Semakin Meluas

Ngawi, Memorandum

Musim kemarau panjang yang terjadi di wilayah Kabupaten Ngawi terus berdampak.

Hingga saat ini desa terdampak kekeringan kembali bertambah menjadi 9 desa yang tersebar di empat Kecamatan wilayah Kabupaten Ngawi.

Kepala pelaksana BPBD Ngawi Prila Yuda Putra menjelaskan, berdasarkan data sampai saat ini data wilayah kekeringan di Ngawi terus bertambah.

Yang mana sebelumnya 8 desa kali ini bertambah satu desa, yakni Desa Kiyonten, Kecamatan Kasreman. “Untuk wilayah yang terdampak kekeringan bertambah menjadi 9 desa,”



Kepala Pelaksana BPBD Ngawi Prila Yuda Putra

katanya.

Prila menyampaikan, terkait de-

ngan penanganan kekeringan ini menjadi tanggung jawab bersama sehingga perlu adanya kolaborasi antar-dinas terkait.

Meskipun begitu, BPBD Ngawi terus melakukan *dropping* air setiap hari sebanyak 2 kali bagi wilayah yang membutuhkan dengan kapasitas 5.000 liter dengan biaya sekali sekitar Rp 400 ribu.

Ditambahkan, bahwa sejauh ini anggaran yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi sekitar Rp 93 juta. “Prediksi musim kemarau ini di bulan Oktober hingga November,” pungkasnya. (ris/dik/nov)

Warga Gemarang Ditemukan Tewas di Sungai Kedung Merak

Ngawi, Memorandum

Warga Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, digegerkan penemuan jasad pria mengambang di Sungai Kedung Merak sekitar pukul 07.30, Selasa, (11/8).

Penemuan jenazah tersebut berawal dari salah seorang warga yang mengira gundukan sampah yang mengambang di sungai.

Selang beberapa jam, warga penasaran dan mengecek ternyata jasad manusia. “Dari laporan warga tersebut kami tindaklanjuti dan melakukan evakuasi bersama BPBD,” kata Kapolsek Kedunggalar AKP Karno.

Ia menjelaskan, setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) jasad pria tersebut bernama Khanani (51), warga setempat.

Menurut keterangan pihak keluarga, korban hilang sejak Senin sore (8/8). “Tidak pulang sejak Senin sore, sempat dicari oleh keluarga hingga



Jasad korban dievakuasi petugas kepolisian dibantu relawan.

kerabat paling jauh tapi tidak ketemu. Baru ditemukan pagi ini (kemarin-red) sudah meninggal di sungai,” jelasnya.

Menurut hasil keterangan keluarga korban dan olah TKP di lapangan, korban diduga sengaja mengakhiri hidupnya dengan cara mencelupkan diri ke sungai lantaran sudah tidak

kuat bekerja lagi sebagai kuli panggul karena sakit seusai mengalami kecelakaan kerja.

“Tidak ditemukan bekas atau tanda mencurigakan di tubuh korban, jasadnya langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan,” pungkasnya. (ris/dik/nov)

Madiun, Memorandum

Tahun ini, Perda Kabupaten Madiun mengalami banyak penyesuaian.

Mulai dari perubahan, pencabutan, hingga penambahan payung hukum. Itu setelah, DPRD Kabupaten Madiun bersama pemkab setempat menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) perubahan tahun 2026 dalam Rapat Paripurna di ruang Rapat DPRD, Selasa (11/8).

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menyebutkan, setidaknya ada 13 Perda yang tertuang pada Propemperda perubahan tersebut.

Di antaranya, Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun alias SOTK, Raperda tentang Desa, Ra-



Rapat Paripurna kesepakatan Propemperda perubahan tahun 2026, Selasa (11/8).

perda tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Raperda tentang Pembentukan Dana Ca-

dangan Pilkada.

“Itu Perda yang paling mendesak, harus segera dibahas karena berpacu dengan waktu,” sebutnya.

Raperda tentang Desa, misalnya, jelas Fery, ha-



Penandatanganan KUA PPAS tahun 2027 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Madiun, Selasa (11/8).

DPRD dan Pemkab Madiun Sepakati KUA PPAS Tahun 2027

Madiun, Memorandum

Skala prioritas pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2027 mulai dipetakan.

Itu menyusul, DPRD Kabupaten Madiun bersama Pemerintah setempat menandatangani Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2027 pada Rapat Paripurna, Selasa (11/8).

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengatakan, fokus utama kuruan APBD 2027 harus termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2030.

“Pembahasan anggaran ini ya ikut regulasi-regulasi sekarang. Karena betul-betul kemarin KPK maupun Kementerian Dalam Negeri itu menekankan harus linier dengan RPJMD,” katanya.

Menurut Fery, penggunaan anggaran tahun 2027 sepenuhnya berada di tangan kepala daerah alias sesuai dengan prioritas tahun kedua yang tertuang pada RPJMD tersebut.

“Yang kita kejar ya prioritas Pak Bupati di tahun kedua ini. Berarti

kalau memang di tahun pertama prioritasnya apa kemarin kok ada yang ketinggalan, ya paling tidak menjadi prioritas kedua,” terangnya. Sesuai tugas pokok dan fungsi dewan, Fery mengaku, legislatif bakal melakukan pengawasan secara ketat terhadap peruntukan anggaran di tahun depan. Ia ingin memastikan program-program yang ada di RPJMD terlaksana secara keseluruhan.

“RPJMD itu adalah jangka panjang Pak Bupati menjabat 5 tahun, itu pun harus betul-betul itu nanti bisa terselesaikan. Dan kami mengharapkan eksekutif tidak keluar dari RPJMD maupun dari RKPD,” ucapnya.

Sementara itu, Fery meminta agar Pemkab Madiun proaktif untuk mengejar penghargaan skala nasional yang memberikan *reward* kepada daerah berupa suntikan anggaran. Mengingat, kekuatan APBD tahun ini hanya di angka Rp 1,8 triliun.

“Kemampuan anggaran segitu tidak akan cukup melakukan program-program dalam RPJMD. Harus ditingkatkan dengan kita mencari

terobosan-terobosan untuk mendapatkan reward dari Pemerintah Pusat. Kalau bergantung pada peningkatan PAD juga susah dengan situasi seperti ini,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengaku akan menaruh prioritas pada sektor pendidikan, pertanian, dan kesehatan sesuai dengan RPJMD. Namun, tetap menyesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat yang baru.

“Karena peraturan regulasi bahwa seluruh anggaran kita ada ketentuannya. Seperti 40 persen untuk infrastruktur, 30 persen untuk biaya gaji, ya kita harapkan kita tetap sesuai dengan regulasi yang ada,” ungkapnya.

Karena dana transfer pusat tidak mengalami kenaikan, Hari berkeinginan kuat untuk mendongkrak PAD melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sekaligus, meningkatkan nilai investasi daerah.

“Kita akan mengoptimalkan BLUD yang kita miliki dan juga beberapa di sektor pertanian dan investasi yang ada di Kabupaten Madiun,” pungkasnya. (adv/aji/nov)